



WALIKOTA CILEGON

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon

SURAT EDARAN

NOMOR 000.7 /364/Bappedalitbang/2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2026

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perangkat daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai salah satu instrumen untuk mendukung tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon. Sehubungan telah dimulainya tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2026, maka perangkat daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2026, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rancangan awal Renja-PD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada prioritas daerah dan arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Tahun Transisi), Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, serta Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagaimana disampaikan pada Konsultasi Publik RKPD Tahun 2026.
2. Substansi rancangan awal Renja-PD Tahun 2026 wajib memperhatikan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota tahun sebelumnya serta hasil evaluasi kinerja perangkat daerah tahun berjalan.
3. Mengacu pada kapasitas keuangan daerah pada Rancangan Awal RKPD tahun 2026, rencana pembangunan pada Rancangan awal Renja-PD Tahun 2026 diprioritaskan pada:
 - a. Pemenuhan belanja mengikat meliputi gaji dan tunjangan ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta hak keuangan DPRD untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan pada kertas kerja;
 - b. Penunjang layanan Perangkat Daerah meliputi :
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
 - 2) Pemeliharaan dan penatausahaan barang milik daerah, termasuk untuk pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/operasional sesuai dengan RKPBMDB;
 - 3) Penatausahaan keuangan Perangkat Daerah;
 - 4) Penyusunan dokumen rencana, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah
 - 5) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 6) Jasa pelayanan umum kantor dengan prioritas pada penyediaan honor non PNS termasuk jaminan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi non PNS;
 - 7) Administrasi umum perangkat daerah, dengan prioritas pada penyediaan alat tulis kantor dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah;
 - 8) Dana penunjang operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan layanan rutin wajib DPRD;
 - 9) Belanja sewa gedung kantor;
- c. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana lokal di Kelurahan sebagai amanat UU No 23 tahun 2014, dengan mempedomani Pedoman Umum DPWKel Tahun 2026 dan hasil pra musrenbangkel tahun perencanaan 2026;
- d. Pelaksanaan usulan aspirasi DPRD berdasarkan hasil reses DPRD;
- e. Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 yaitu :
- 1) Peningkatan kualitas pendidikan, dengan prioritas pada pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan honor guru honorer, bantuan operasional sekolah, beasiswa pendidikan untuk siswa tidak mampu di sekolah swasta pada tingkat dasar, serta beasiswa full sarjana;
 - 2) Peningkatan kualitas kesehatan, dengan prioritas pada pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam upaya pemenuhan UHC, peningkatan kualitas layanan puskesmas dan RSUD melalui optimalisasi anggaran BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD, layanan ambulance gratis, penyediaan honor kader posyandu, serta penerapan sistem layanan kesehatan berbasis online untuk penguatan promotif dan preventif kesehatan;
 - 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas pada :
 - Pemenuhan SPM bidang sosial, bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, masyarakat tidak mampu dan anak terlantar
 - Pemutakhiran dan integrasi data penerima program kesejahteraan sosial melalui pelaksanaan sistem layanan rujukan terpadu dan penguatan peran puskesmas;
 - Fasilitasi akses pembiayaan, daya saing produk, fasilitasi pemasaran serta penguatan peran koperasi dalam meningkatkan daya saing UMK serta optimalisasi sistem pengelolaan basis data UMK;
 - Peningkatan layanan informasi ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi serta fasilitas pemagangan pada perusahaan;
 - 4) Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat, dengan prioritas pada :
 - Pemenuhan SPM bidang perumahan dan permukiman, pekerjaan umum, trantibum linmas serta kebencanaan;
 - Peningkatan kualitas dan kualitas jalan dengan kualitas pada jalan dengan tingkat kerusakan tinggi serta penyiapan pembebasan lahan JLU;
 - Pembangunan taman publik yang diintegrasikan dengan sarpras olahraga dan pusat kreatifitas dan inovasi

- Optimalisasi TPSA dan Pengelolaan bank sampah yang didukung dengan gerakan peduli kebersihan berbasis masyarakat;
- Penguatan integrasi penanganan banjir, dengan fokus pada pembangunan tandon, penanganan sedimentasi sungai, serta peningkatan kualitas drainase dan gorong gorong
- Penataan wajah kota dengan prioritas di koridor utama trase PCI-Simpang Tiga;
- Dukungan penyelenggaraan event seni dan budaya berbasis komunitas masyarakat di ruang-ruang publik;
- Peningkatan produktifitas pertanian melalui gerakan pemanfaatan pekarangan dan lahan tidur serta optimalisasi pemanfaatan KPT;
- Layanan rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta penguatan kolaborasi antar pelaku pembangunan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5) Peningkatan kualitas layanan pemerintahan, dengan prioritas pada :

- Integrasi basis data kependudukan yang akurat dengan sistem layanan pemerintahan;
- Dukungan untuk penyelenggaraan pelayanan publik satu pintu dan layanan investasi yang profesional ;
- Peningkatan layanan jaringan SPBE, Integrasi sistem informasi layanan pemerintahan, integrasi layanan aduan serta peningkatan layanan pusat data;
- Peningkatan talenta digital ASN, penguatan penerapan sistem meritokrasi dan manajemen kinerja berbasis teknologi informasi serta penerapan reward dan punishment berbasis pencapaian kinerja;
- Optimalisasi upaya peningkatan dan pengelolaan PAD melalui penguatan basis data PAD serta digitalisasi layanan pajak dan retribusi;
- Penguatan peran kader pembangunan daerah melalui dukungan penyediaan honor kader pembangunan;
- Peningkatan manajemen aset daerah melalui sistem informasi aset dan keuangan yang terintegrasi, sertifikasi, penertiban dan penyelamatan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- Penyediaan basis data spasial dan sektoral untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

4. Dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran belanja pada Rancangan Awal Renja, agar mempedomani kebijakan sbb :

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Rencana Aksi SPM Kota Cilegon Tahun 2023-2027;
- 2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah agar mempedomani Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- 3) Dukungan pelayanan pemerintahan yang penganggarnya melalui belanja hibah, dicantumkan pada RKPD setelah melalui tahapan proses pada e-hibah bansos sesuai dengan peraturan perundangan;
- 4) Pelayanan pemerintahan yang penganggarnya melalui belanja transfer (DAK Fisik, DAK non fisik kecuali sertifikasi dan tambahan penghasilan guru dan Bantuan

Keuangan tahun 2026), dianggarkan setelah terbitnya regulasi yang mengatur hal tersebut;

- 5) Non PNS yang telah lulus P3K tidak diperkenankan digantikan dengan pengangkatan non PNS baru;
 - 6) Belanja alat tulis kantor, kertas dan cover penunjang kegiatan dianggarkan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 7) Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan fisik dilakukan pada tahun yang berbeda (pengadaan tanah, FS, DED, Fisik). Namun apabila Kepala Perangkat Daerah dapat memperhitungkan penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat mengalokasikan pada tahun anggaran yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - 8) Penyusunan output kegiatan dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinans, tidak monoton dan tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perekonomian;
5. Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2026, seluruh perangkat daerah agar mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
- a) Menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
 - b) Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
 - c) Menyiapkan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
 - d) Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas program/kegiatan sesuai dengan tujuan Perangkat Daerah.
6. Seluruh dokumen referensi yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2026 dapat diakses pada link <https://bit.ly/renjaPD2026-clg>

Demikian instruksi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 03 Maret 2025
WALI KOTA CILEGON,

H. ROBINSAR

Lampiran I

Surat No. : 000.7 / 364 / Bappedalitbang / 2025

Perihal : Edaran Penyempurnaan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2026

Kepada Yth:

1. Inspektur Kota Cilegon
2. Sekretaris DPRD Kota Cilegon
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Dinas Kesehatan
11. Kepala Dinas Sosial
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
22. Kepala Dinas Perhubungan
23. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
24. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
28. Camat Kecamatan Cilegon
29. Camat Kecamatan Ciwandan
30. Camat Kecamatan Cibeber
31. Camat Kecamatan Grogol
32. Camat Kecamatan Pulomerak
33. Camat Kecamatan Purwakarta
34. Camat Kecamatan Jombang
35. Camat Kecamatan Citangkil
36. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon

LAMPIRAN II

Surat Walikota Cilegon No. : 000.7/364/Bappedalitbang /2025

Tentang

TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2026
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017

No	Tahapan Perencanaan	Waktu Pelaksanaan	Penjelasan	Unsur Pelaksana/ penanggung jawab	Instrumen & Hasil Tahapan
1.	Pra Musrenbangkel	November-Desember 2024	<p>Pra Musrenbangkel dilaksanakan oleh Kelurahan sebagai tahapan awal untuk menjaring usulan pembangunan tahun 2026 yang akan dibahas melalui musrenbang kelurahan.</p> <p>Pra Musrenbangkel ini dilaksanakan melalui forum rembug warga di tingkat RW dengan dilakukan pendampingan oleh fasilitator musrenbangkel, dengan output berupa usulan pembangunan untuk tahun 2026 di masing-masing RW yang akan dimatangkan lebih lanjut pada forum musrenbang kelurahan.</p>	Seluruh Kelurahan	<p>1. Surat Edaran pelaksanaan pra musrenbang</p> <p>2. Matriks usulan pra-musrenbangkel</p>
2.	Input/rekapitulasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	02-13 Desember 2024	Input rancangan awal renja PD melalui SIPD dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra PD dan pagu indikatif rancangan awal PD. Output dari kegiatan ini adalah matriks rancangan awal Renja PD	Seluruh perangkat daerah	<p>1. SE Sekretaris Daerah tentang penyusunan Rancangan Awal Renja</p> <p>2. Jadwal penginputan rancangan awal renja PD</p> <p>3. Dokumen Rancangan awal Renja PD beserta Matriks Rancangan awal Renja PD</p>

No	Tahapan Perencanaan	Waktu Pelaksanaan	Penjelasan	Unsur Pelaksana/ penanggung jawab	Instrumen & Hasil Tahapan
3.	Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026	27 Desember 2024	Konsultasi publik Rancangan Awal RKPD ditujukan untuk menjaring masukan stakeholder terkait permasalahan, strategi dan prioritas pembangunan di tahun 2026. Sebagai <i>leading sector</i> adalah Bidang Rendalev pada Bappedalitbang Kota Cilegon.	Bappedalitbang	1. Undangan konsultasi publik 2. SK Tim Pelaksana 3. Paparan Konsultasi Publik 4. Rancangan Awal RKPD 5. Berita Acara Konsultasi Publik
3.	Input/rekapitulasi penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	1-15 Februari 2025	Input rancangan renja PD melalui SIPD dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra PD dan pagu indikatif rancangan awal PD. Output dari kegiatan ini adalah matriks Renja awal PD	Seluruh perangkat daerah	1. SE Walikota tentang penyusunan Rancangan Awal Renja 2. Jadwal penginputan rancangan awal renja PD 3. Dokumen Rancangan awal Renja PD beserta Matriks Rancangan awal Renja PD
4.	Verifikasi Rancangan Awal Renja – PD 2026	1-15 Februari 2025	Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh Bappeda (Bidang Teknis) yang ditujukan untuk memastikan bahwa Rancangan awal Renja berisikan informasi yang lengkap tentang output, rencana anggaran, serta kinerja program.	1. Bappedalitbang 2. Sekretariat Daerah	1. Dokumen Rancangan awal Renja PD beserta Matriks Rancangan awal renja PD yang sudah diverifikasi
5.	Musrenbang Kelurahan	16 Januari – 3 Februari 2025	Musrenbangkel dilaksanakan oleh seluruh Kelurahan di bulan januari. Unsur Bappedalitbang berperan sebagai pengendali mutu/substansi jalannya pelaksanaan musrenbangkel di 43 kelurahan. Hasil musrenbangkel dituangkan dalam Dokumen RPTKel yang berisi usulan pembangunan tahun 2026 dari masing-masing kelurahan baik yang didanai melalui anggaran DPWKel ataupun diusulkan melalui anggaran Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya usulan hasil musrenbangkel kepada Perangkat Daerah akan dibahas lebih lanjut pada forum Musrenbang Kecamatan, untuk memilih usulan yang sangat prioritas yang akan diusulkan melalui Renja PD tahun 2026.	1. Seluruh Kelurahan 2. Bappedalitbang 3. OPD (selaku undangan)	1. Surat Edaran Penyusunan jadwal Musrenbangkel & Musrenbangcam 2. Jadwal Musrenbangkel 3. Pointer Musrenbangkel 4. Materi/paparan Narasumber Bappeda untuk Musrenbangkel 5. Dokumentasi proses musrenbangkel 6. Hasil monitoring musrenbangkel 7. Berita acara hasil musrenbangkel

No	Tahapan Perencanaan	Waktu Pelaksanaan	Penjelasan	Unsur Pelaksana/ penanggung jawab	Instrumen & Hasil Tahapan
6.	Input Hasil Musrenbang Kelurahan	16 Januari – 3 Februari 2025	Input hasil musrenbangkel melalui SIPD dilaksanakan oleh Kelurahan berpedoman kepada hasil musrenbangkel. Untuk memudahkan ‘mendeteksi kesesuaian DPWKel dengan dokumen perencanaan, Bappedalitbang menyusun kamus usulan kegiatan DPWKel dan RPTKel.	Seluruh kelurahan	1. SE tentang jadwal penginputan hasil musrenbangkel 2. Matriks RPTKel dan DPWKel
7.	Verifikasi input hasil musrenbang Kelurahan	16 Januari – 3 Februari 2025	Verifikasi RPTKel dan DPWkel dilakukan secara bertahap, <i>pertama</i> oleh Bappeda (bidang PPM dan PSIK) untuk : 1) mengevaluasi kesesuaian pemilihan ‘Bidang Pembangunan’ dan penggunaan kamus kegiatan; 2) memastikan bahwa input usulan pembangunan telah memuat informasi yang lengkap, khususnya terkait output, volume dan lokasi; 3) memastikan bahwa output DPWKel telah sesuai dengan Pedoman Umum; <i>kedua</i> , oleh Kecamatan untuk memilih prioritas usulan hasil muskel dan ‘menyampaikan’ usulan tersebut kepada Perangkat Daerah (dalam forum-PD);	1. Bappedalitbang 2. Sekretariat Daerah 3. Kecamatan	Matriks RPTKel dan DPWKel yang telah diverifikasi
8.	Musrenbang Kecamatan Tahun Perencanaan 2026	6 – 27 Februari 2025	Musrenbangcam dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan. Unsur bappeda berperan sebagai narasumber sekaligus pengendali jalannya pelaksanaan musrenbangcam di 8 kecamatan.	1. Kecamatan 2. Bappedalitbang 3. Unsur OPD 4. Setda	1. Pointer Musrenbang Kecamatan 2. Dokumentasi proses musrenbangcam 3. Hasil monitoring musrenbangcam 4. Berita acara hasil musrenbangcam

No	Tahapan Perencanaan	Waktu Pelaksanaan	Penjelasan	Unsur Pelaksana/ penanggung jawab	Instrumen & Hasil Tahapan
			Hasil musrenbangkec dituangkan dalam Dokumen RPTKec yang berisi usulan prioritas pembangunan tahun 2026 hasil Musrenbang Kelurahan yang 'disampaikan' kepada Perangkat Daerah.		
9.	Input hasil Reses DPRD	16 Januari - 4 Maret 2025	Input usulan reses DPRD melalui SIPD dilakukan oleh DPRD sebagai salah satu input dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2026	DPRD	1. Hasil inputan reses DPRD
10.	Verifikasi hasil Reses DPRD	16 Januari - 4 Maret 2025	Verifikasi usulan reses dilakukan oleh Bappedalitbang (bidang PPM dan PSIK) untuk : 1) mengevaluasi kesesuaian pemilihan 'Bidang Pembangunan' dan penggunaan kamus kegiatan; 2) memastikan bahwa input usulan pembangunan telah memuat informasi yang lengkap, khususnya terkait output, volume dan lokasi; 3) memastikan bahwa usulan reses telah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang tepat.	1. Bappedalitbang 2. Setda	1. Hasil inputan reses DPRD yang sudah diverifikasi
11.	Forum PD 2026	5-7 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Forum PD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menerima usulan hasil musrenbangcam/usulan Reses, yang ditujukan untuk menyelaraskan: 1) Rancangan awal renja dengan hasil musrenbangcam; 2) Rancangan awal renja dengan hasil reses DPRD • Khusus terkait kegiatan mandatori 'inovasi kewilayahan' pada DPWKel, dilakukan forum khusus untuk penajaman rencana aksi inovasi di masing-masing wilayah kelurahan di tahun 2026. • Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 	Seluruh Perangkat Daerah	1. Surat undangan forum-PD 2. RPTKec 2026 3. Hasil Reses DPRD 4. Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah 5. Dokumen Rancangan Renja PD beserta Matriks Rancangan Renja-PD 2026
12.	Input Rancangan Renja PD	5 – 8 Maret 2025	Input rancangan renja PD (hasil pembahasan Renja-PD) dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah berpedoman kepada pagu indikatif rancangan renja disertai dengan input informasi yang lengkap terkait target kinerja serta mengacu kepada hasil forum PD;	Seluruh Perangkat Daerah	1. Dokumen Rancangan Renja PD beserta Matriks Rancangan Renja PD

No	Tahapan Perencanaan	Waktu Pelaksanaan	Penjelasan	Unsur Pelaksana/ penanggung jawab	Instrumen & Hasil Tahapan
13.	Verifikasi rancangan renja PD	5 – 8 Maret 2025	Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh Bappedalitbang (Bidang PPM & Bidang PSIK) yang ditujukan untuk memastikan bahwa Rancangan Renja berisikan informasi yang lengkap tentang target kinerja, kesesuaian dengan pagu kegiatan serta konsistensi dengan hasil forum PD.	1. Bappedalitbang 2. Setda	1. Dokumen Rancangan Renja PD beserta Matriks Rancangan renja PD yang sudah diverifikasi 2. Notulen hasil verifikasi
14.	Musrenbang RKPD 2026	M2-M3 Maret 2025	Musrenbang dilakukan oleh Bappedalitbang bertujuan untuk mensosialisasikan tentang rencana pembangunan di tahun 2026.	Bappedalitbang	1. Materi musrenbang RKPD 2026 2. Rancangan RKPD 2026 3. Berita Acara hasil Musrenbang RKPD 2026
15.	Input Rancangan Akhir Renja PD	M4 Maret – M4 April 2025	Input rancangan akhir renja PD dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah berpedoman kepada pagu indikatif rancangan akhir renja disertai dengan input informasi yang lengkap terkait target kinerja serta uraian belanja kegiatan sesuai dengan SSH dan SB yang berlaku.	Seluruh perangkat daerah	1. Dokumen Rancangan Akhir Renja PD beserta Matriks Rancangan Akhir Renja PD
16.	Forum Pasca-Musrenbang RKPD 2024	21 April – 2 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Pasca musrenbang dilaksanakan oleh Bappedalitbang (bidang PPM dan Bidang PSIK) bertujuan untuk menajamkan indikator kinerja, keselarasan uraian belanja dan kewajaran biaya kegiatan, serta menindaklanjuti hasil forum dan musrenbang. • Juga dilakukan pembahasan dengan majelis pertimbangan dan TAPD dan Walikota terkait penganggaran hibah bansos yang telah melalui proses e-hibah bansos. • Forum ini dilakukan secara multilateral, melibatkan Bappedalitbnag, Setda, BPKPAD (khususnya bidang asset) dan Perangkat Daerah terkait. Terkait aset dilakukan verifikasi terhadap keselarasan usulan asset dengan RKBMD dan RKPBMMD serta ketepatan 	1. Unsur Bappedalitbang 2. Unsur BPKPAD 3. Unsur Setda 4. Unsur Perangkat Daerah	1. Surat Undangan Pasca musrenbang 2. SK Tim Pelaksana Forum Pasca Musrenbang 3. Pedoman Pasca Musrenbang 4. Berita acara pasca musrenbang

No	Tahapan Perencanaan	Waktu Pelaksanaan	Penjelasan	Unsur Pelaksana/ penanggung jawab	Instrumen & Hasil Tahapan
			penggunaan sub kegiatan “pengadaan dan penyediaan asset”.		
17.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	21 April – 2 Mei 2025	Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh Bappedalitbang (Melalui Bidang PPM dan PSIK) yang ditujukan untuk memastikan bahwa Rancangan Akhir Renja telah memuat informasi secara lengkap, baik terkait target kinerja, rencana anggaran, serta keselarasan dengan prioritas pusat dan provinsi.	Bappedalitbang Setda	1. Dokumen Rancangan Akhir Renja PD beserta Matriks Rancangan Akhir renja PD yang sudah diverifikasi 2. Notulen hasil verifikasi
18.	Review Dokumen Rancangan RKPD 2026	6-14 Mei 2025	Review Dokumen RKPD dilaksanakan oleh Inspektorat bertujuan untuk mereview konsistensi perencanaan baik antar waktu maupun secara tahapan.	Bappedalitbang Inspektorat	1. Surat inspektorat terkait himbauan review RKPD 2. Surat permohonan review RKPD kepada Inspektorat 3. Catatan Hasil Review 4. Tindak lanjut atas catatan hasil review
19.	Penyusunan Dokumen Hasil Pengendalian Perumusan RKPD 2026	6-14 Mei 2025	Dokumen Hasil Pengendalian Perumusan RKPD dilakukan oleh Bappeda (bidang rendalev) bertujuan sebagai bukti pelaksanaan pengendalian dalam memesatkan perumusan RKPD sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, serta konsisten dan relevan terhadap tujuan dan sasaran RPJMD. Dokumen ini juga sebagai instrumen untuk syarat kelengkapan proses fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2026 oleh Provinsi Banten	Bappedalitbang	1. Laporan Hasil Pengendalian

No	Tahapan Perencanaan	Waktu Pelaksanaan	Penjelasan	Unsur Pelaksana/ penanggung jawab	Instrumen & Hasil Tahapan
20.	Fasilitasi Rancangan RKPD oleh Bappeda Provinsi Banten	14-20 Mei 2025	Fasilitasi RKPD dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bertujuan untuk menjaga konsistensi perencanaan antar hierarki pembangunan. Fasilitasi ini juga untuk memastikan bahwa Dokumen RKPD telah mempedomani RPJMD Kota Cilegon dan selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten dan Nasional	1. Bappedalitbang 2. Inspektorat 3. BPKPAD 4. Bappeda Provinsi Banten	1. Surat provinsi terkait permintaan rancangan RKPD Kab/kota 2. Surat undangan fasilitasi RKPD dari Provinsi Banten 3. Surat permohonan fasilitasi RKPD kepada Gubernur Banten 4. Catatan hasil fasilitasi 5. Tindak lanjut atas catatan hasil fasilitasi
21.	Penetapan RKPD Tahun 2026	30 Mei 2025	Penetapan Perwal RKPD Tahun 2026	1. Bappedalitbang 2. Bagian Hukum Setda	Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Cilegon Tahun 2026
22	Finalisasi dan Penetapan Dokumen Renja-PD Tahun 2026	Paling lambat 30 Juni 2025	Penetapan Perwal Renja-PD Tahun 2026	1. Seluruh OPD 2. Bappedalitbang	Peraturan Wali Kota tentang Renja-PD Kota Cilegon Tahun 2026